

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, H. Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Febrianty, Yenny, 2023, *Hukum Kondominium dan Apartemen*, CV. Green Publisher Indonesia, Cirebon.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Goesniadhie, Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Halim, Ridwan, 1990, *Hak Milik, Kondominium, dan Rumah susun*, Puncak Karma, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1- *Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, Siti Soemarti, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seri Hukum Dagang, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

- Huizink, J.B., 2004, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hutagalung, Arie S, 1998, *Condominium dan Permasalahannya*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- H.S, Salim, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel: Edisi Revisi*, Mirra Buana, Yogyakarta.
- Isnaeni, Moch, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Kuswahyono, Imam, 2004, *Hukum Rumah susun: Suatu bekal pengantar pemahaman*, Bayumedia, Malang.
- Marzuki, dan Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta.
- Nazir, M., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli, Tami, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Lampung.
- Santoso, Urip, 2017, *Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun*, Kencana, Depok.
- Sastrawidjaja, Prof. Dr. H. Man S., S.H., S.U, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung.
- Shofie, Yusuf, 2000, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo, 2023, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia*, Kontan Publishing, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan:Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Press, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2004, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2021, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Subekti, R, 2014, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subhan, Hadi, 2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta.

Sulaiman, Robintan, dan Joko Prabowo, 2000, Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Sunarto, 1990, Metode Penelitian Deskriptif, Usaha Nasional, Surabaya.

Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta, 2017, Hukum Bisnis Properti di Indonesia, Grasindo, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Halim, Arivan, 2022, Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling, Jakarta, Justice Voice1, no. 2, diakses melalui <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.192> pada tanggal 16 Januari 2024, pukul 00.14 WIB.

Hanif, Rifqani Nur Fauziah, 2021, Sebab-sebab Berakhirnya Kepailitan, dalam Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13930/Sebab-sebab-Berakhirnya-Kepailitan.html>, tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.43 WIB.

Purbandari, 2012, Kepastian dan Perlindungan Hukum pada Pemasaran Properti dengan Sistem Pre Project Selling, E-Journal Widya No. 320

Sekarini, Marsha Angela Putri, dan I Nyoman Darmadha, 2018, Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan dengan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum.

Setyowati, Retno Kus dan Asmaniar, 2020, Pembatalan Transaksi Hak Atas Tanah Oleh Penjual Dengan Alasan Belum Lunas, *Binamulia Hukum* 9, no. 1 diakses melalui <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.362> pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 11.58 WIB.

Sjachran, Robert, 2017, Urgensi Penerapan Prinsip Kecermatan Pembuatan PPJB Properti Dalam Tahap Pembangunan, Disampaikan Pada Seminar Nasional

Wang, Jialan, Jeyul Yang, Benjamin Charles Iverson, dan Raymond Kluender, , “Bankruptcy and the COVID-19 Crisis”, SSRN, 2020.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Isnaeni, Moch, 2017, *Urgensi Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Fasilitator Sistem Pre Project Selling*, Disampaikan Pada Seminar Nasional

Juntua, Norma, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Satuan Rumah susun Sebagai Kreditor Konkuren Atas Penyelesaian Tagihan Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saputra, Haris Surya, 2016, *Kebutuhan Peraturan Daerah Atau Peraturan Kepala Daerah yang Mengatur Tentang Rumah susun Terkait dengan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah susun Dalam Hal Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Rumah susun (Studi Kasus Kepailitan PT Saphir Yogya Super Mall)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sasongko, Fanny Van, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Rumah susun (Studi Kasus pada Apartemen Prima 1 dengan Pengembang PT Primaland Internusa Development Jakarta)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Harian Disway, “Diputus Pailit, 10 ribu Korban PT. Sipoa Propertindo Abadi Menunggu Hasil Lelang Aset” <https://harian.disway.id/read/692858/diputus-pailit-10-ribu-korban-pt-sipoa-propertindo-abadi-menunggu-hasil-lelang-aset>, diakses 26 Agustus 2023.

Harian Merapi, “Kreditur Konkuren Berencana Ajukan Gugatan, Tolak Kurator Lelang Aset Apartemen Malioboro Park View”
<https://www.harianmerapi.com/news/pr-405210646/kreditur-konkuren-berencana-ajukan-gugatan-tolak-kurator-lelang-aset-apartemen-malioboro-park-view>, diakses 26 Agustus 2023.

Katadata, “Meikarta Kembalikan Uang 114 Konsumen, Bagaimana Dengan Pembeli Lain?”
<https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/641303c6cd9c9/meikarta-kembalikan-uang-114-konsumen-bagaimana-dengan-pembeli-lain>, diakses 26 Agustus 2023.

OSS, “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 Kode 41011”
<https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/ae6b72e0-49ba-4ce6-a337-90f542145ef2>, diakses 03 Oktober 2023.

Radarmalang, “MCP Tanggung Utang Rp 280 M, 145 Pembeli Bisa Terancam Diusir”
<https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811081248/mcp-tanggung-utang-rp-280-m-145-pembeli-bisa-terancam-diusir>, diakses 25 Agustus 2023.

Seputarcibubur.com, “210 Pembeli Apartemen Antasari 45 Gugat Pengembang, Ini Sejumlah Kejanggalan di Balik Gugatan Pailit PT PDS”
<https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/properti/pr-1783545676/210-pembeli-apartemen-antasari-45-gugat-pengembang-ini-sejumlah-kejanggalan-di-balik-gugatan-pailit-pt-pds>, diakses 28 Agustus 2023.

Warta Ekonomi, “MPI Terancam Pailit, Pemerhati Hukum: Pengurus Jangan Abaikan Hak Pembeli Apartemen”
<https://wartaekonomi.co.id/read307078/mpi-terancam-pailit-pemerhati-hukum-pengurus-jangan-abaikan-hak-pembeli-apartemen?page=1>, diakses 28 Agustus 2023.

E. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran RI Nomor 4443. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah susun sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Lembaga

Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran RI Nomor 6856. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran RI Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6845.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Lembaga Negara RI Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran RI Nomor 6625. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaga Negara RI Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran RI Nomor 6630. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/PRTM/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 777.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.SBY jo. Nomor 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby, tanggal 12 Agustus 2015.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 33/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Smg, tanggal 8 September 2020.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2020.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2020.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2020.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, tanggal 9 November 2021.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2021.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 April 2022.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby, tanggal 31 Maret 2023.